

**LAPORAN KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2014
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI PERTANIAN**

018.09.648673

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2014



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

Jl. Tentara Pelajar No. 10. Bogor (16114)

Jawa Barat

Telepon (0251) 8351277 – Faksimile (0251) 8350928

E-mail: bbp2tp@litbang.deptan.go.id

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LK K/L) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Tahun 2014 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2014 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak senilai Rp. 56.809.104,- atau mencapai 378,72% dari estimasi pendapatan senilai Rp. 15.000.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2014 adalah senilai Rp. 25.653.667.347,- atau mencapai 92,54% dari alokasi anggaran senilai Rp. 27.721.706.000,-.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Periode Yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

Uraian	31 Desember 2014			31 Desember 2013
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi thd Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	15.000.000,-	56.809.104,-	378,72%	124.775.060,-
Belanja Negara	27.721.706.000,-	25.653.667.347,-	92,54%	32.104.311.002,-

II. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada per 31 Desember 2014 dan 2013.

Jumlah Aset adalah senilai Rp. 20.999.103.901,- yang terdiri dari Aset Lancar senilai Rp. 7.597.075.100,-, Aset Tetap senilai Rp. 13.402.028.801,-, Piutang Jangka Panjang senilai Rp. 0,- dan Aset Lainnya senilai Rp. 0,-.

Jumlah Kewajiban adalah senilai Rp. 7.596.803.600,- yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah senilai Rp. 13.402.300.301,- yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar senilai Rp. 271.500,- dan Ekuitas Dana Investasi senilai Rp. 13.402.028.801,-.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2014 dan 2013

URAIAN	TANGGAL NERACA		KENAIKAN/ (PENURUNAN)	
	31 Desember 2014 (Rp)	31 Des 2013 (Rp)	(Rp)	%
ASET				
Aset Lancar	7.648.612.659,-	7.835.190.560,-	(186.318.918),-	(2,38)
Aset Tetap	13.402.028.801,-	10.415.212.108,-	2.986.816.693,-	28,68
Piutang Jangka Panjang,00,00,00
Aset Lainnya,00,00,00
Jumlah Aset	21.050.641.460,-	18.250.402.668,-	2.800.497.775,-	15,34
KEWAJIBAN				
Kewajiban Jangka Pendek	7.596.803.600,-	7.835.099.560,-	(238.295.960),-	(3,04)
EKUITAS DANA				
Ekuitas Dana Lancar	51.809.059,-	91.000,-	51.977.042,-	56833
Ekuitas Dana Investasi	13.402.028.801,-	10.415.212.108,-	2.986.816.693,-	28,68
Jumlah Ekuitas Dana	13.453.837.860,-	10.415.303.108,-	3.038.793.735,-	29,17
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	21.050.641.460,-	18.250.402.668,-	2.800.497.775,-	15,34

III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2014
DAN 31 Desember 2013

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2014			31 Desember 2013
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN	B.1				
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak		15.000.000	56.809.104	378,72	124.775.060
Jumlah Pendapatan		15.000.000	56.809.104	378,72	124.775.060
BELANJA TRANSAKSI KAS	B.2				
1. Belanja Pegawai	B.2.1	7.872.141.000	7.602.873.145	96,58	7.368.890.953
2. Belanja Barang	B.2.2	15.868.865.000	14.153.704.427	89,19	20.918.023.134
3. Belanja Modal	B.2.3	3.980.700.000	3.897.089.775	97,90	3.817.396.915
4. Belanja Sosial	B.2.4	0	0	0,00	0
BELANJA TRANSAKSI NON KAS		0	0	0	0
Jumlah Belanja		27.721.706.000	25.653.667.347	92,54	32.104.311.002

Bogor, 31 Desember 2014

Kepala Balai Besar,

Dr. Ir. Abdul Basit, MS
 Nip. 19610929 198603 1 003

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Disamping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bogor, 31 Desember 2014
Kepala Balai Besar,

Dr. Ir. Abdul Basit, MS
Nip. 19610929 198603 1 003

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (648673) Kementerian Pertanian yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bogor, 31 Desember 2014
Kepala Balai Besar,

Dr. Ir. Abdul Basit, MS
Nip. 19610929 198603 1 003

DAFTAR ISI

<u>KATA PENGANTAR</u>	i
<u>PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB</u>	ii
<u>DAFTAR ISI</u>	iii
<u>DAFTAR TABEL</u>	vii
<u>DAFTAR LAMPIRAN</u>	x
<u>DAFTAR GRAFIK</u>	xi
<u>RINGKASAN</u>	xii
<u>I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN</u>	xv
<u>II. NERACA</u>	xvi
<u>III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</u>	1
<u>A. PENJELASAN UMUM</u>	1
<u>A.1 DASAR HUKUM</u>	1
<u>A.1 KEBIJAKAN TEKNIS BALAI BESAR PENGKAJIAN</u>	1
<u>A.3 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN</u>	2
<u>A.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI</u>	3
<u>(1) Pendapatan</u>	3
<u>(2) Belanja</u>	3
<u>(3) Aset</u>	3
<u>(4) Kewajiban</u>	6
<u>(5) Ekuitas Dana</u>	7
<u>(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tak Tertagih</u>	7
<u>(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap</u>	8
<u>B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN</u>	10
<u>B.1 Pendapatan Negara dan Hibah</u>	10
<u>B.2 Belanja Negara</u>	11
<u>B.2.1 Belanja Pegawai</u>	13
<u>B.2.2 Belanja Barang</u>	15
<u>B.2.3 Belanja Modal</u>	16
<u>B.2.4 Belanja Sosial</u>	17
<u>C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA</u>	19
<u>C.1 Aset Lancar</u>	19
<u>C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran</u>	19

C.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	19
C.1.3	Kas Lainnya dan Setara Kas	20
C.1.4	Kas pada Badan Layanan Umum	20
C.1.5	Piutang Bukan Pajak	21
C.1.6	Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	21
C.1.7	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)	21
C.1.8	Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	21
C.1.9	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	21
C.1.10	Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	22
C.1.11	Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	22
C.1.12	Uang Muka Belanja (Prepayment)	22
C.1.13	Persediaan	22
C.1.14	Persediaan Badan Layanan Umum	23
C.2	Aset Tetap	23
C.2.1	Tanah	24
C.2.2	Tanah Badan Layanan Umum	24
C.2.3	Peralatan dan Mesin	25
C.2.4	Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum	25
C.2.5	Gedung dan Bangunan	26
C.2.6	Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum	26
C.2.7	Jalan, Irigasi dan Jaringan	27
C.2.8	Jalan, Irigasi dan Jaringan Badan Layanan Umum	27
C.2.9	Aset Tetap Lainnya	27
C.2.10	Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum	28
C.2.11	Konstruksi Dalam Pengerjaan	28
C.2.12	Akumulasi Penyusutan	29
C.3	Piutang Jangka Panjang	30
C.3.1	Tagihan Penjualan Angsuran	30
C.3.2	Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Tagihan Penjualan Angsuran	30
C.3.3	Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	30
C.3.4	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	30

C.4 Aset Lainnya	31
C.4.1 Aset Tak Berwujud	31
C.4.2 Aset Tak Berwujud Badan Layanan Umum	31
C.4.3 Aset Lain-Lain	31
C.4.4 Aset Lain-Lain Badan Layanan Umum	31
KEWAJIBAN	32
C.5 Kewajiban Jangka Pendek	32
C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga	32
C.5.2 Uang Muka dari KPPN	32
C.5.3 Pendapatan Yang Ditangguhkan	32
C.5.4 Pendapatan Diterima Dimuka	33
C.5.5 Utang Jangka Pendek Lainnya	33
EKUITAS	34
C.6 Ekuitas Dana Lancar	34
C.6.1 Cadangan Piutang	34
C.6.2 Cadangan Persediaan	34
C.6.3 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	34
C.6.4 Dana Lancar BLU	34
C.6.5 Ekuitas Dana Lancar Lainnya	34
C.6.6 Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima	35
C.6.7 Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan	35
C.7 Ekuitas Dana Investasi	35
C.7.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	35
C.7.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	35
D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	36
D.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA	36
D.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN ITJEN KEMTAN	36
D.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL	37
D.4 REKENING PEMERINTAH	37
D.5 HIBAH	37
D.6 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN	38

LAPORAN-LAPORAN PENDUKUNG

LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan

LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja

Neraca Percobaan

LAPORAN BARANG PENGGUNA

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 : Ringkasan laporan Realisasi Anggaran Periode Yang Berakhir <i>31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013</i>	xii
Tabel 2 : Ringkasan Neraca per <i>31 Desember 2014 dan 2013</i>	xiii
Tabel 3 : Penggolongan Kualitas Piutang	8
Tabel 4 : Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNB	10
Tabel 5 : Perbandingan Realisasi PNB untuk periode yang berakhir <i>31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013</i>	11
Tabel 6 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir <i>31 Desember 2012</i>	12
Tabel 7 : Anggaran dan Realisasi Belanja per Kegiatan untuk periode yang berakhir <i>31 Desember 2014</i>	12
Tabel 8 : Perbandingan realisasi Belanja untuk periode yang berakhir <i>31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013</i>	13
Tabel 9 : Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Berdasarkan Sub Kelompok Belanja untuk periode yang berakhir <i>31 Desember 2014</i>	14
Tabel 10 : Perbandingan Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir <i>31</i> <i>Desember 2014 dan 31 Desember 2013</i>	15
Tabel 11 : Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Berdasarkan Sub Kelompok Belanja untuk periode yang berakhir <i>31 Desember 2014</i>	15
Tabel 12 : Perbandingan Belanja Barang untuk periode yang berakhir <i>31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013</i>	16
Tabel 13 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Berdasarkan Sub Kelompok Belanja untuk periode yang berakhir <i>31 Desember 2014</i>	16
Tabel 14 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir <i>31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013</i>	17
Tabel 15 : Anggaran dan Realisasi Belanja sosial Berdasarkan Sub Kelompok Belanja untuk periode yang berakhir <i>31 Desember 2014</i>	17
Tabel 16 : Perbandingan Realisasi Belanja Sosial untuk periode yang berakhir <i>31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013</i>	18
Tabel 17 : Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per <i>31 Desember 2014 dan</i> <i>31 Desember 2013</i>	19

Tabel 18	: Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per <i>31 Desember 2014</i> dan <i>31 Desember 2013</i>	20
Tabel 19	: Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas	20
Tabel 20	: Rekening BLU pada satker Balai Besar Pengkajian <i>31 Desember 2014</i>	20
Tabel 21	: Rincian Piutang Bukan Pajak	21
Tabel 22	: Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek	21
Tabel 23	: Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)	21
Tabel 24	: Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)	21
Tabel 25	: Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Provinsi	21
Tabel 26	: Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Provinsi	22
Tabel 27	: Rincian Belanja Dibayar Dimuka	22
Tabel 28	: Rincian Persediaan	23
Tabel 29	: Rincian Persediaan BLU	23
Tabel 30	: Rincian Aset Tetap	24
Tabel 31	: Akumulasi Penyusutan <i>31 Desember 2014 dan 2013</i>	30
Tabel 32	: Penghitungan Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin <i>per 31 Desember 2014</i>	30
Tabel 33	: Penghitungan Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan <i>per 31 Desember 2014</i>	30
Tabel 34	: Penghitungan Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan <i>per 31 Desember 2014</i>	30
Tabel 35	: Penghitungan Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya <i>per 31 Desember 2014</i>	30
Tabel 36	: Penghitungan Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain <i>per 31 Desember 2014</i>	30
Tabel 37	: Rincian Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per Debitur	31
Tabel 38	: Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per Debitur	31
Tabel 39	: Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	31

	(TP/TGR) per Debitur	
Tabel 40	: Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Debitur	31
Tabel 41	: Rincian Aset Lainnya	32
Tabel 42	: Rincian Aset tak Berwujud	32
Tabel 43	: Rincian Utang kepada Pihak Ketiga	33
Tabel 44	: Rincian Pendapatan Yang Ditangguhkan	33

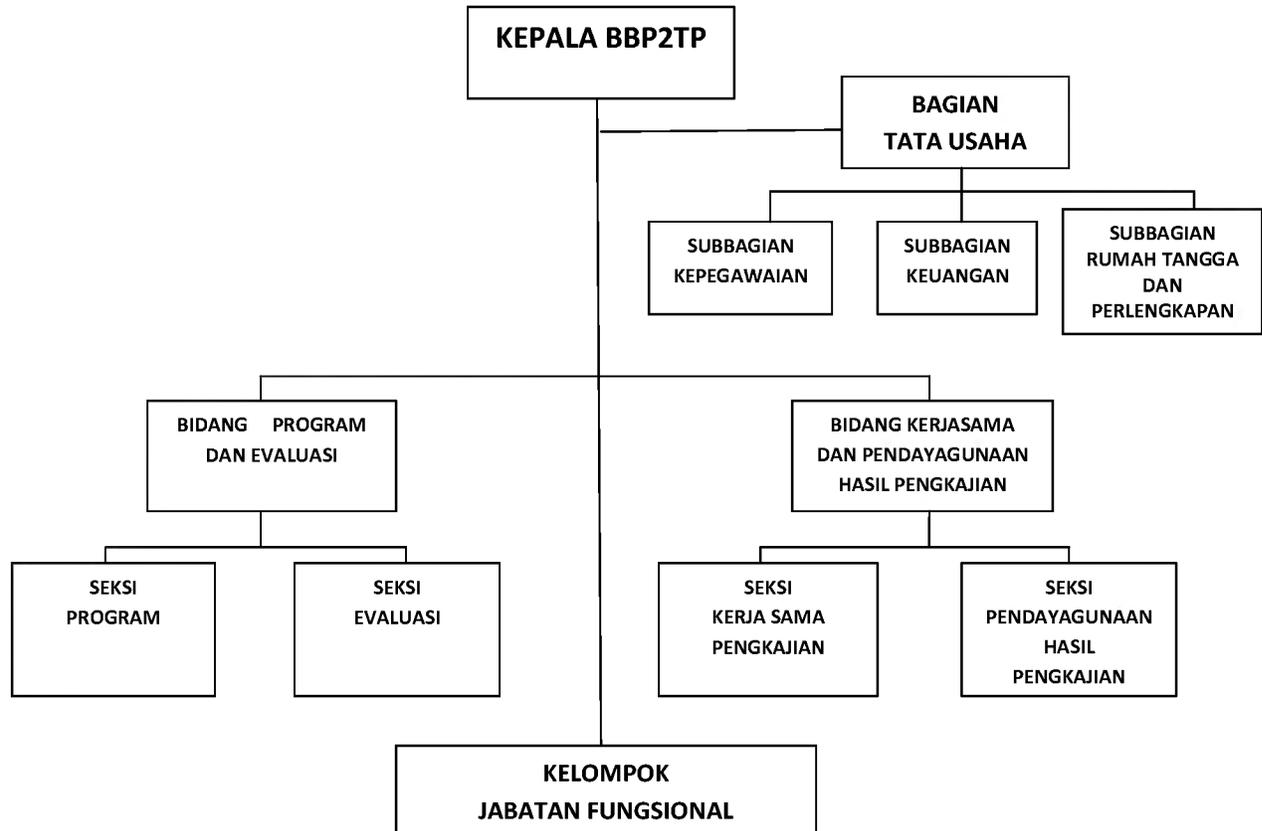
DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1 : Hasil Rekonsiliasi SAU-SAI dengan KPPN setempat	01
Lampiran 2 : Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi antara petugas SAKPA dan Bendahara Pengeluaran	02
Lampiran 3 : SSBP terkait penyetoran sisa Kas Di Bendahara Pengeluaran (UP/TUP)	03
Lampiran 4 : Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi antara petugas SAKPA dan Bendahara Penerimaan	04
Lampiran 5 : SSBP terkait penyetoran Kas Di Bendahara Penerimaan (PNBP)	05
Lampiran 6 : SSBP terkait penyetoran Kas Lainnya dan Setara Kas (Jasa Giro)	06
Lampiran 7 : Berita Acara Pemeriksaan Fisik (Stock Opname) Persediaan 31 Desember 2014 dan Lampiran Hasil Pemeriksaan Fisik	07
Lampiran 8 : Daftar Aset Tanah 31 Desember 2014	08
Lampiran 9 : SKTJM terkait pencatatan TP/TGR	09
Lampiran 10 : Rekening Pemerintah per 31 Desember 2014	10

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 : Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja *untuk* periode yang berakhir 31 Desember 2014 13

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BB PENGAJIAN



Lampiran Peraturan Menteri Pertanian

Nomor : 39/Permentan/OT.140/3/2013

Tanggal : 11 Maret 2013

A. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**C.1 Aset Lancar**

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp. 0,-

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per *31 Desember 2014* dan *2013* masing-masing senilai *Rp. 0,-* dan *Rp. 358.101.294,-* yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi antara petugas SAKPA dan Bendahara Pengeluaran tersaji pada *<Lampiran>*. Jumlah tersebut terdiri dari :

Tabel 17. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per *31 Desember 2014* dan *31 Desember 2013*

No	Jenis	31 Des 2014	Tahun 2013
1	Bank	Rp -	Rp 358,101,294
2	Uang Tunai	Rp -	Rp -
Jumlah		Rp -	Rp 358,101,294

Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp. 0,-

C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal *31 Desember 2014 dan 2013* masing-masing adalah senilai *Rp. 0,-* dan *Rp. 0,-* yang mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi antara petugas SAKPA dan Bendahara Penerimaan tersaji pada *<Lampiran>*, jumlah tersebut terdiri dari :

Tabel 18. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per *31 Desember 2014* dan *31 Desember 2013*

No	Jenis	31 Des 2014	Tahun 2013
1	Bank	Rp -	Rp -
2	Uang Tunai	Rp -	Rp -
Jumlah		Rp -	Rp -

Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp.
7.596.803.600,-

C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal *31 Desember 2014* dan *2013* masing-masing senilai Rp. 7.596.803.600,- dan Rp. 7.476.998.266,- yang merupakan kas berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Rincian Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per *31 Desember 2014* terdiri dari :

Tabel 19. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

No.	Keterangan	Jumlah
1	Dana Tunjangan Kinerja yang belum ditransfer	Rp 7,596,803,600
2	Pajak PPh yang Belum Disetor	Rp -
3	Pengembalian Belanja belum disetor ke kas negara	Rp -
Jumlah		Rp 7,596,803,600

Kas pada badan
Layanan Umum
Rp. 0,-

C.1.4 Kas pada Badan Layanan Umum

Saldo Kas pada Badan Layanan Umum per *31 Desember 2014* dan *2013* masing-masing senilai Rp. 0,- dan Rp. 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara BLU yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tupoksi masing-masing satuan kerja. Kas ini tidak disetor ke Kas Negara tetapi akan digunakan kembali pada tahun *2014* sebagai saldo awal.

<i>Piutang Bukan Pajak</i> <i>Rp. 0,-</i>	C.1.5 Piutang Bukan Pajak Piutang Bukan Pajak per tanggal <i>31 Desember 2014 dan 2013</i> masing-masing senilai <i>Rp. 0,-</i> dan <i>Rp. 0,-</i> yang merupakan semua hak atau klaim kepada pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.
<i>Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak</i> <i>Rp. 0,-</i>	C.1.6 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek per <i>30 Juni 2014 dan 2013</i> adalah masing-masing senilai <i>Rp. 0,-</i> dan <i>Rp. 0,-</i> yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.
<i>BL TPA</i> <i>Rp. 0,-</i>	C.1.7 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal <i>31 Desember 2014 dan 2013</i> masing-masing adalah senilai <i>Rp. 0,-</i> dan <i>Rp. 0,-</i> . Bagian Lancar TPA merupakan saldo TPA yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca.
<i>Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar TPA</i> <i>Rp. 0,-</i>	C.1.8 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per <i>31 Desember 2014 dan 2013</i> adalah masing-masing senilai <i>Rp. 0,-</i> dan <i>Rp. 0,-</i> yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing tagihan.
<i>BL TGR</i> <i>Rp. 51.796.542,-</i>	C.1.9 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per <i>31 Desember 2014 dan 2013</i> masing-masing senilai <i>Rp. 51.796.542,-</i> dan <i>Rp. 0,-</i> yang merupakan hak atau klaim terhadap pihak lain yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau

kurang.

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih – Bag.
Lancar TP/TGR
Rp. 258.983,-

C.1.10 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per *31 Desember 2014* dan *2013* adalah masing-masing senilai Rp. *258.983,-* dan Rp. *0,-* yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Belanja Dibayar
Dimuka
(Prepaid)

Rp. 0,-

C.1.11 Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per *31 Desember 2014* dan *2013* masing-masing senilai Rp. *0,-* dan Rp. *0,-* Belanja Dibayar Dimuka merupakan uang yang dibayarkan kepada pihak ketiga, di mana sampai tanggal neraca belum diterima prestasi kerja, yang berupa barang/jasa dari pihak ketiga yang bersangkutan.

Uang Muka
Belanja
(Prepayment)
Rp. 0,-

C.1.12 Uang Muka Belanja (Prepayment)

Saldo Uang Muka Belanja per *31 Desember 2014* dan *2013* masing-masing senilai Rp. *0,-* dan Rp. *0,-*. Uang Muka Belanja merupakan sejumlah uang tertentu yang dibayarkan kepada pihak ketiga dari total pembayaran.

Persediaan

Rp. 271.500,-

C.1.13 Persediaan

Persediaan per *31 Desember 2014* dan *2013* masing-masing adalah senilai Rp. *271.500,-* dan Rp. *91.000,-*. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo persediaan pada neraca per *31 Desember 2014* berdasarkan hasil stock opname yang tersaji pada *<lampiran>*.

Rincian Persediaan per *31 Desember 2014* adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Rincian Persediaan

No.	Uraian	31 Des 2014	31 Desember 2013
1	Barang Konsumsi	271,500	91,000
2	Suku Cadang	0	0
3	Bahan baku	0	0
4	dst	0	0
Jumlah		271,500	91,000

Kondisi atas semua jenis persediaan di atas dalam kondisi baik.

Persediaan
Badan Layanan
Umum

Rp. 0,-

C.1.14 Persediaan Badan Layanan Umum

Persediaan Badan Layanan Umum per *31 Desember 2014* dan *2013* masing-masing adalah senilai Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

C.2 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per *31 Desember 2014* dan *2014* adalah senilai Rp. *13.402.028.801,-* dan Rp. *10.415.212.108,-* yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap *Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian per 31 Desember 2014* adalah sebagai berikut :

Tabel 30. Rincian Aset Tetap

No.	Uraian	31 Des 2014	31 Des 2013	Kenaikan/ Penurunan
1	Tanah	0	0	0
2	Tanah BLU	0	0	0
3	Peralatan dan Mesin	10,156,138,831	7,908,175,063	2,247,963,768
4	Peralatan dan Mesin BLU	0	0	0
5	Gedung dan Bangunan	10,956,768,273	9,073,814,273	1,882,954,000
6	Gedung dan Bangunan BLU	0	0	0
7	Jalan Irigasi dan Jaringan	770,646,300	770,646,300	0
8	Jalan Irigasi dan Jaringan BLU	0	0	0
9	Aset Tetap Lainnya	239,181,090	209,181,315	29,999,775
10	Aset Tetap Lainnya BLU	0	0	0
11	KDP	0	0	0
Jumlah		22,122,734,494	17,961,816,951	4,160,917,543
Akum. Penyusutan		8,720,705,693	7,546,604,843	1,174,100,850
Nilai Buku Aset Tetap		13,402,028,801	10,415,212,108	2,986,816,693

Tanah

Rp. 0,-

C.2.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki *Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian per 31 Desember 2014 dan 2013* adalah masing-masing senilai *Rp. 0,- dan Rp. 0,-*.

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian sampai dengan TA. 2014 belum memiliki saldo nilai tanah, hal ini dikarenakan tanah yang ditempati Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian masih dicatat di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian. Pada tanggal 29 April 2011 Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian telah Menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Lahan dengan Nomor : 1123/PL.230/I.11/04/2011. *(Surat Pengelolaan Lahan Terlampir)*.

Tanah Badan
Layanan Umum
Rp. 0,-

C.2.2 Tanah Badan Layanan Umum

Saldo aset tetap berupa tanah Badan Layanan Umum (BLU) yang dimiliki *Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian per 31 Desember 2014 dan 2013* adalah masing-masing senilai *Rp. 0,- dan Rp. 0,-*.

Peralatan dan
Mesin Rp.
10.156.138.831
,-

C.2.3 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per *31 Desember 2014* dan *2013* adalah Rp. 10.156.138.831,- dan Rp. 7.908.175.063,-. *Tidak ada* perbedaan antara belanja modal peralatan dan mesin dengan perolehan dari transaksi pembelian.

Mutasi nilai aset peralatan dan mesin per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2013	7,908,175,063
Mutasi tambah:	
- Pembelian	2,024,193,768
- Transfer masuk	448,071,000
Total Mutasi Tambah	2,472,264,768
Mutasi kurang:	
- Transfer keluar	182,801,000
- Reklasifikasi keluar, panggung	41,500,000
Total Mutasi Kurang	224,301,000
Saldo per 31 Desember 2014	10,156,138,831
Akum. Penyusutan s.d. 31 Desember 2014	6,837,011,581
Nilai Buku per 31 Desember 2014	3,319,127,250

Penjelasan mutasi penambahan dan pengurangan adalah sebagai berikut:

Mutasi tambah Peralatan dan Mesin senilai Rp. 2.472.264.768,- berasal dari:

- Pembelian (Rp. 2.024.193.768)
- Transfer masuk (Rp. 448.071.000)

Mutasi kurang Peralatan dan Mesin senilai Rp. 224.301.000,- berasal dari:

- Transfer keluar (Rp. 182.801.000)
- Reklasifikasi keluar, panggung (Rp. 41.500.000)

Peralatan dan
Mesin Badan
Layanan Umum
Rp. 0,-

C.2.4 Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum

Nilai aset tetap berupa peralatan dan mesin Badan Layanan Umum (BLU) per *31 Desember 2014* dan *2013* adalah Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Gedung dan
Bangunan Rp.
10.956.768.273
,-

C.2.5 Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per *31 Desember 2014* dan *2013* adalah Rp. 10.956.768.273,- dan Rp. 9.073.814.273,-. Realisasi belanja dalam rangka perolehan aset gedung dan bangunan per *31 Desember 2014* adalah senilai Rp. 1.882.954.000,- yang merupakan belanja modal gedung dan bangunan. Sedangkan perolehan gedung dan bangunan dari pembelian adalah senilai Rp. 0,-.

Tidak ada perbedaan antara belanja modal gedung dan bangunan dengan perolehan dari transaksi pembelian.

Mutasi nilai aset Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2013	9,073,814,273
Mutasi tambah:	
- Pengembangan Gedung Kantor Permanen	1,882,954,000
Total Mutasi Tambah	1,882,954,000
Mutasi kurang:	
- Mutasi Kurang 1	0
Total Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2014	10,956,768,273
Akum. Penyusutan s.d. 31 Desember 2014	1,300,685,680
Nilai Buku per 31 Desember 2014	9,656,082,593

Penjelasan mutasi penambahan dan pengurangan adalah sebagai berikut:

Mutasi tambah gedung dan bangunan senilai Rp. 1.882.954.000,- berasal dari:

- *Pengembangan Gedung Kantor Permanen (Rp. 1.882.954.000,-*

Mutasi kurang gedung dan bangunan senilai Rp. 0,-

Gedung dan
Bangunan BLU
Rp. 0,-

C.2.6 Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum

Nilai gedung dan bangunan Badan Layanan Umum (BLU) per *31 Desember 2014* dan *2013* adalah Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan BLU per *31 Desember 2014* adalah senilai Rp. 0,-. Sedangkan perolehan gedung dan bangunan BLU dari pembelian adalah senilai Rp. 0,-.

Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp.
770.646.300,-

C.2.7 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai jalan, irigasi dan jaringan per *31 Desember 2014* dan *2013* adalah *Rp. 770.646.300,-* dan *Rp. 770.646.300,-*. Realisasi belanja dalam rangka perolehan aset jalan, irigasi dan jaringan per *31 Desember 2014* adalah senilai *Rp. 0,-* yang merupakan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan. Sedangkan perolehan jalan, irigasi dan jaringan dari transaksi pembelian adalah senilai *Rp. 0,-*.

Tidak ada perbedaan antara belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dengan perolehan dari transaksi pembelian.

Mutasi nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2013	770,646,300
Mutasi tambah:	
- Uraian mutasi tambah 1	0
Total Mutasi Tambah	0
Mutasi kurang:	
- Mutasi Kurang 1	0
Total Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2014	770,646,300
Akum. Penyusutan s.d. 31 Desember 2014	583,008,432
Nilai Buku per 31 Desember 2014	187,637,868

Jalan, Irigasi
dan Jaringan
BLU

Rp. 0,-

C.2.8 Jalan, Irigasi dan Jaringan Badan Layanan Umum

Nilai jalan, irigasi dan jaringan Badan Layanan Umum (BLU) per *31 Desember 2014* dan *2013* adalah *Rp. 0,-* dan *Rp. 0,-*. Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan BLU per *31 Desember 2014* adalah senilai *Rp. 0,-*. Sedangkan perolehan jalan, irigasi dan jaringan dari transaksi pembelian adalah senilai *Rp. 0,-*.

Aset Tetap
Lainnya Rp.
239.181.090,-

C.2.9 Aset Tetap Lainnya

Nilai aset tetap lainnya per *31 Desember 2014* dan *2013* adalah *Rp. 239.181.090,-* dan *Rp. 209.181.315,-*. Realisasi belanja dalam rangka perolehan aset tetap lainnya per *31 Desember*

2014 adalah senilai Rp. 0,- yang merupakan belanja modal lainnya. Sedangkan perolehan aset tetap lainnya dari transaksi pembelian adalah senilai Rp. 0,-.

Tidak ada perbedaan antara belanja modal lainnya dengan perolehan dari transaksi pembelian.

Mutasi nilai aset Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2014	209,181,315
Mutasi tambah:	
- Uraian mutasi tambah 1	29,999,775
Total Mutasi Tambah	29,999,775
Mutasi kurang:	
- Mutasi Kurang 1	0
Total Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2014	239,181,090
Akum. Penyusutan s.d. 31 Desember 2014	0
Nilai Buku per 31 Desember 2014	239,181,090

Aset Tetap
Lainnya BLU
Rp. 0,-

C.2.10 Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum

Nilai aset tetap lainnya badan layanan umum per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Realisasi belanja dalam rangka perolehan aset aset tetap lainnya BLU per 31 Desember 2014 adalah senilai Rp. 0,- yang merupakan belanja modal lainnya BLU. Sedangkan perolehan aset tetap lainnya BLU dari transaksi pembelian adalah senilai Rp. 0,-.

C.2.11 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing senilai Rp. 0,- dan Rp. 0,- yang merupakan pembangunan gedung kantor yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Mutasi nilai aset konstruksi dalam pengerjaan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp. 0,-

Saldo per 31 Desember 2013	0
Mutasi tambah:	
- Uraian mutasi tambah 1	0
Total Mutasi Tambah	0
Mutasi kurang:	
- Mutasi Kurang 1	0
Total Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2014	0

Penjelasan mutasi penambahan dan pengurangan adalah sebagai berikut:

Mutasi tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai *Rp. 0,-*

Mutasi kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai *Rp. 0,-*

Akumulasi
Penyusutan

Rp.

8.720.705.693,-

C.2.12 Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per *31 Desember 2014* dan *2013* adalah masing-masing senilai *Rp. 8.720.705.693,-* dan *Rp. 7.546.604.843,-* merupakan penjumlahan akumulasi penyusutan dari masing-masing Akun pada pos Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 31. Akumulasi Penyusutan
per 31 Desember 2014 dan 2013

Uraian	31 Des 2014	31 Des 2013	Kenaikan/ Penurunan
Peralatan dan Mesin	6,837,011,581	5,808,333,630	1,028,677,951
Peralatan dan Mesin BLU	0	0	0
Gedung dan Bangunan	1,300,685,680	1,164,473,464	136,212,216
Gedung dan Bangunan BLU	0	0	0
Jalan Irigasi dan Jaringan	583,008,432	573,797,749	9,210,683
Jalan Irigasi dan Jaringan BLU	0	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Aset Tetap Lainnya BLU	0	0	0
Jumlah	8,720,705,693	7,546,604,843	1,174,100,850

C.3 Piutang Jangka Panjang

Tagihan
Penjualan
Angsuran

Rp. 0,-

C.3.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Jumlah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per *31 Desember 2014* dan *2013* masing-masing senilai Rp. 0,- dan Rp. 0,- merupakan tagihan atas penjualan BMN yang pembayarannya melalui angsuran yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan.

Penyisihan
Piutang tak
Tertagih-
Tagihan
Penjualan
Angsuran

Rp. 0,-

C.3.2 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per *31 Desember 2014* dan *2013* adalah masing-masing senilai Rp. 0,- dan Rp. 0,-, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing tagihan.

Tuntutan
Perbendaharaan

Rp. 0,-

C.3.3 Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per *31 Desember 2014* dan *2013* masing-masing senilai Rp. 0,- dan Rp. 1.480.000,-. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Penyisihan
Piutang tak
Tertagih -
Tuntutan
Perbendaharaan

Rp. 0,-

C.3.4 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per *31 Desember 2014* dan *2013* adalah masing-masing senilai Rp. 0,- dan Rp. 0,-, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

(TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.

Aset Lainnya
Rp. 0,-

C.4 Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya per *31 Desember 2014* dan *2013* adalah *Rp. 0,-* dan *Rp. 0,-* yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Aset Tak
Berwujud
Rp. 0,-

C.4.1 Aset Tak Berwujud

Saldo aset tak berwujud (ATB) per *31 Desember 2014* dan *2013* adalah *Rp. 0,-* dan *Rp. 0,-*. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Tak
Berwujud
Badan Layanan
Umum
Rp. 0,-

C.4.2 Aset Tak Berwujud Badan Layanan Umum

Saldo Aset Tak Berwujud BLU per *31 Desember 2014* dan *2013* adalah *Rp. 0,-* dan *Rp. 0,-*.

Aset Lain-lain
Rp. 0,-

C.4.3 Aset Lain-Lain

Saldo aset lain-lain per *31 Desember 2014* dan *2013* adalah *Rp. 0,-* dan *Rp. 0,-* yang merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional *Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian*, namun belum diusulkan proses penghapusan dari BMN ke Pengelola Barang.

Aset Lain-lain
Badan Layanan
Umum
Rp. 0,-

C.4.4 Aset Lain-Lain Badan Layanan Umum

Saldo Aset Lain Lain Badan Layanan Umum per *31 Desember 2014* dan *2013* adalah *Rp. 0,-* dan *Rp. 0,-*.

KEWAJIBAN**C.5 Kewajiban Jangka Pendek**

Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp.
7.596.803.600,-

C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per *31 Desember 2014* dan *2013* masing-masing senilai Rp. 7.596.803.600,- dan Rp. 7.476.998.266,- merupakan belanja yang masih harus dibayar dan utang kepada pihak ketiga lainnya.

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga *Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian* adalah sebagai berikut:

Tabel 43. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	Rp -	Kekurangan pembayaran gaji pegawai
2	Belanja barang yang masih harus dibayar	Rp -	Penggunaan langganan daya dan jasa yang belum dibayar
3	Utang kepada Pihak ketiga lainnya	Rp 7,596,803,600.00	Dana yang belum dibagikan kepada yang berhak
4	dsb..		
Total		Rp 7,596,803,600.00	

Uang Muka dari
KPPN
Rp. 0,-

C.5.2 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per *31 Desember 2014* dan *2013* masing-masing senilai Rp. 0,- dan Rp. 358.101.294,- merupakan UP/TUP yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Pendapatan
Yang
Ditangguhkan
Rp. 0,-

C.5.3 Pendapatan Yang Ditangguhkan

Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan akun penyeimbang dari Kas Di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya dan Setara Kas. Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan per *31 Desember 2014* dan *2013* masing-masing senilai Rp. 0,- dan Rp. 0,- merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan.

Tabel 44. Rincian Pendapatan Yang Ditangguhkan

No	Jenis Pendapatan	30 Juni 2014
1	<i>Pendapatan PNB</i>	Rp -
2	<i>Pengembalian Belanja</i>	Rp -
3	<i>Pungutan/Potongan Pajak yang belum disetor</i>	Rp -
4	<dst>	Rp -
Total		Rp -

Pendapatan yang ditangguhkan senilai *Rp. 0,-* merupakan akun yang terdiri dari akun :

1. Kas dibendahara Penerimaan senilai *Rp. 0,-* yaitu diantaranya berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke kas Negara/penerimaan PNB yang belum disetor yang terdapat pada *Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian*;
2. Kas Lainnya dan Setara Kas senilai *Rp. 0,-* diantaranya berasal dari jasa giro yang belum disetor, belanja perjalanan dinas yang belum disetor, pajak yang belum disetor dan PNB.

*Pendapatan
Diterima
Dimuka
Rp. 0,-*

C.5.4 Pendapatan Diterima Dimuka

Jumlah Pendapatan Diterima di Muka per *31 Desember 2014* dan *2013* masing-masing senilai *Rp. 0,-* dan *Rp. 0,-* merupakan pendapatan yang sudah masuk ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga. Saldo per *31 Desember 2014* senilai *Rp. 0,-*.

*Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp. 0,-*

C.5.5 Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per *31 Desember 2014* dan *2013* masing-masing senilai *Rp. 0,-* dan *Rp. 0,-* merupakan belanja yang masih harus dibayar dan utang kepada pihak ketiga lainnya yang harus segera diselesaikan. Saldo per *31 Desember 2014* sebesar *Rp. 0,-*.

EKUITAS

C.6 Ekuitas Dana Lancar

Cadangan
Piutang
Rp.
51.537.559,-

C.6.1 Cadangan Piutang

Jumlah Cadangan Piutang per *31 Desember 2014* dan *2013* masing-masing senilai *Rp. 51.537.559,-* dan *Rp. 0,-* merupakan jumlah ekuitas dana lancar *Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian* dalam bentuk piutang setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

Cadangan
Persediaan
Rp. 271.500,-

C.6.2 Cadangan Persediaan

Jumlah Cadangan Persediaan per *31 Desember 2014* dan *2013* masing-masing senilai *Rp. 271.500,-* dan *Rp. 91.000,-* merupakan jumlah ekuitas dana lancar *Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian* dalam bentuk persediaan.

Dana yang
harus
disediakan
untuk
pembayaran
Utang Jangka
Pendek
Rp.0,-

C.6.3 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

Jumlah Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per *31 Desember 2014* dan *2013* masing-masing sebesar minus *Rp. 0,-* dan minus *Rp. 0,-*. Akun tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

Dana Lancar
BLU
Rp. 0,-

C.6.4 Dana Lancar BLU

Jumlah Dana Lancar BLU per *31 Desember 2014* dan *2013* masing-masing senilai *Rp. 0,-* dan *Rp. 0,-*. Akun tersebut merupakan akun penyeimbang akun Kas pada Badan Layanan Umum.

Ekuitas Dana
Lancar Lainnya
Rp. 0,-

C.6.5 Ekuitas Dana Lancar Lainnya

Jumlah Ekuitas Dana Lancar Lainnya per *31 Desember 2014* dan *2013* masing-masing senilai *Rp. 0,-* dan *Rp. 0,-*. Akun tersebut merupakan penyeimbang dari akun Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah.

Barang/Jasa
yang masih
harus diterima
Rp. 0,-

C.6.6 Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima

Barang/Jasa yang Harus Diterima per *31 Desember 2014* dan *2013* masing-masing sebesar *Rp. 0,-* dan *Rp. 0,-*. Perkiraan tersebut merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang akan diterima dari pihak lain.

Barang/Jasa
yang masih
harus
diserahkan
Rp. 0,-

C.6.7 Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan

Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan per *31 Desember 2014* dan *2013* sebesar minus *Rp. 0,-* dan minus *Rp. 0,-*. Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang harus diserahkan kepada pihak lain.

C.7 Ekuitas Dana Investasi

Diinvestasikan
Dalam Aset
Tetap
Rp.
13.402.028.801
,-

C.7.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap per *31 Desember 2014* dan *2013* adalah senilai *Rp. 13.402.028.801,-* dan *Rp. 10.415.212.108,-* merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.

Diinvestasikan
Dalam Aset
Lainnya
Rp. 0,-

C.7.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per *31 Desember 2014* dan *2013* masing-masing senilai *Rp. 0,-* dan *Rp. 0,-* merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Aset Lainnya.

B. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA**D.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

Saldo kas lainnya dan setara kas per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 7.596.803.600,- merupakan saldo setoran Tukin untuk BPTP dan LPTP bulan Desember 2014 yang mengalami keterlambatan pembayaran karena keterbatasan waktu pembayaran.

D.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Terdapat SKTJM Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sesuai Perintah Tugas No. Print 1737/H/R/11/2014 tanggal 10 November 2014 atas pengelolaan anggaran yang menimbulkan kerugian negara dan potensi penerimaan PNPB pada satker BBP2TP senilai Rp. 79.585.646,- yang sebagian telah disetor dengan rincian seperti dibawah ini :

Tabel Perkembangan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi DIPA BBP2TP

No.	Judul kegiatan TGR	Senilai	Penyelesaian TGR s/d 31-12-2014	Sisa TGR
1	Tunjangan Fungsional	Rp 43,500,000	Rp 1,100,000	Rp 42,400,000
2	Kegiatan KRPL	Rp 5,250,000	Rp 5,250,000	Rp -
3	Sewa Kantin dan Koperasi	Rp 7,186,605	Rp 5,081,071	Rp 2,105,534
4	Pihak Ketiga pengadaan Rehabilitasi (Rekanan)	Rp 12,191,665	Rp 12,191,665	Rp -
5	Pihak Ketiga pengadaan Alat Studio	Rp 9,791,008	Rp 2,500,000	Rp 7,291,008
6	Pihak Ketiga pengadaan Rollerblind	Rp 1,666,368	Rp 1,666,368	Rp -
Jumlah		Rp 79,585,646	Rp 27,789,104	Rp 51,796,542

No.	SSBP	Jumlah
1	SSBP tgl 16-12-2014 Bank BRI Cab. Bogor NTPN : 0005 0201 0403 0408	Rp1,100,000.00
2	SSBP tgl 16-12-2014 Bank BRI Cab. Bogor NTPN : 0909 0403 0314 0905	Rp2,500,000.00
3	SSBP tgl 16-12-2014 Bank BRI Cab. Bogor NTPN : 0201 1114 0013 0310	Rp1,666,368.00
4	SSBP tgl 16-12-2014 Bank BRI Cab. Bogor NTPN : 0711 0211 0613 1306	Rp5,250,000.00
5	SSBP tgl 17-12-2014 Bank BRI Cab. Bogor NTPN : 1200 1202 0513 1112	Rp12,191,665.00
6	SSBP tgl 31-12-2014 Bank BRI Cab. Bogor NTPN : 1109 0213 0202 0503	Rp5,081,071.00
Jumlah		Rp27,789,104.00

Hasil audit kinerja Balai Besar Pengkajian Tahun 2014 telah ditindaklanjuti ke Badan Litbang Pertanian pada bulan Desember 2014 sedangkan sisanya akan ditindaklanjuti pada tahun 2015.

D.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL

Informasi tentang pendapatan dan belanja secara **akrual** dimaksudkan sebagai tahap menuju pada penerapan anggaran yang dilengkapi dengan informasi hak dan kewajiban yang diakui sebagai penambah atau pengurang nilai kekayaan bersih. Pos-pos yang dapat diakrualkan antara lainya : **a.** Belanja yang masih harus dibayar; **b.** Belanja yang dibayar dimuka; **c.** Pendapatan yang harus diterima ; **d.** Pendapatan yang diterima dimuka; **e.** Penyusutan, Amortisasi dan Deplesi ; **f.** Penyisihan piutang tak tertagih.

Belanja yang harus dibayar adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima/dinikmati dan/atau perjanjian/komitmen yang dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas/hakperjanjian/komitmen tersebut.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima oleh satuan kerja/pemerintah karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih satuan kerja/pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah.

D.4 REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional adalah :

No.	Nomor Rekening	Atas Nama Rekening	Bank	Saldo Rekening
1.	'019 391 3600	Bendahara Pengeluaran	BNI'46 Cabang Bogor	Rp. 7.596.803.600,-
2.				

Saldo rekening tersebut di atas per *31 Desember 2014* tersaji pada *<Lampiran>*.

D.6 HIBAH

Pada tahun *20X1* *<Nama Satker>* menerima hibah langsung berupa *<uang/ barang dan jasa>* sebagaimana tersaji pada *<Lampiran>*.

E.6 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**1. Realisasi Pelaksanaan Kerjasama Kemitraan dengan Badan Litbang Pertanian**

Selama tahun 2014, Satker BBP2TP menerima anggaran kerjasama penelitian dari Satker Badan Litbang Pertanian sebanyak 8 kerjasama senilai total Rp. 2.246.238.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2014 senilai Rp. 2.178.931.031,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Judul kegiatan	Anggaran	Realisasi s/d 31-12-2014	%
1	Model Peningkatan Kapasitas Penyuluhan dalam pemanfaatan Informasi Iklim mendukung Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rp 126,220,000	Rp 115,312,500	91.36%
2	Kajian Teknologi spesifik Lokasi kedelai di Lahan Sawah Tadah Hujan Propinsi Banten	Rp 117,600,000	Rp 112,042,200	95.27%
3	Koordinasi dan Evaluasi KKP3SL Lingkup BBP2TP TA. 2014	Rp 250,000,000	Rp 230,348,500	92.14%
4	Koordinasi Model Pengembangan Pertanian Perdesaan Melalui Inovasi (m-P3MI)	Rp 250,000,000	Rp 230,789,900	92.32%
5	Model Pengembangan Pertanian Perdesaan Melalui Inovasi (m-P3MI) Berbasis Tanaman Pangan Lahan Kering di Kabupaten Bogor, Jawa Barat	Rp 170,000,000	Rp 163,831,400	96.37%
6	Dukungan Balitbangtan-Kementerian Pertanian dalam acara " Sail raja Ampat" Tahun 2014	Rp 403,500,000	Rp 397,818,450	98.59%
7	simposium Internasional Aplikasi Analisis sistem (Internasional Symposium On Applied System Analysis)	Rp 642,468,000	Rp 642,363,466	99.98%
8	Pelatihan/TOT Metode pengkajian Penyuluhan dan Evaluasi Kinerja Diseminasi Hasil Litkaji	Rp 286,450,000	Rp 286,424,615	99.99%
Jumlah		Rp 2,246,238,000	Rp 2,178,931,031	

2. Struktur Organisasi Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

Secara struktural, Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian dipimpin oleh Kepala Balai Besar dan memiliki satu Bagian dan dua Bidang. Telah terjadi pergantian Kepala Balai Besar dari Dr. Ir. Agung Hendriadi, M.Eng kepada Dr. Ir. Abdul Basit, MS sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1012.I/Kpts/KP.330/09/2014 tanggal 29 September 2014. Selain itu di Balai Besar Pengkajian terdapat kelompok pejabat fungsional seperti, Penyuluh, Litkayasa dan fungsional lainnya. Bagan struktur organisasi sebagai berikut :

A. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah Rp.
56.809.104,-

A.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2014 adalah senilai Rp. 56.809.104,- atau mencapai 378,72% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan senilai Rp. 15.000.000,-.

Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBPN sampai dengan tanggal pelaporan dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

Tabel 4. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBPN

Kode 4 Digit	Uraian 4 digit	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
4231	Pendapatan dan Penjualan Lainnya	-	-	-
4231	Pendapatan dan Pemindahtanganan Lainnya	-	-	-
4231	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	-	-
4232	Pendapatan Jasa Lainnya	15,000,000	16,280,000	108.53
4239	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	-	12,740,000	-
4239	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang diderita Negara/ TGR	-	27,789,104	-
4239	Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	-	-
JUMLAH BRUTO		15,000,000	56,809,104	378.73
PENGEMBALIAN		-	-	-
JUMLAH NETTO		15,000,000	56,809,104	378.73

Berdasarkan tabel di atas, beberapa uraian realisasi pendapatan lebih tinggi dibandingkan estimasinya. Hal ini disebabkan karena:

- Pendapatan jasa lainnya lebih tinggi dibandingkan estimasinya dikarenakan adanya peningkatan realisasi pendapatan jasa lainnya yaitu pendapatan dari sewa mess Balai Besar Pengkajian.
- Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL lebih tinggi dibandingkan estimasinya dikarenakan tidak dicantumkannya penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL dalam estimasi pendapatan di DIPA Balai Besar Pengkajian.
- Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita negara/ TGR lebih tinggi dibandingkan estimasinya dikarenakan tidak dicantumkannya pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita negara/ TGR dalam estimasi pendapatan di DIPA Balai Besar Pengkajian.

Sementara pendapatan yang realisasinya lebih rendah dibandingkan estimasinya tidak ada.

Realisasi PNBP *per 31 Desember 2014* mengalami penurunan senilai *Rp. 37.965.956,-* atau *30,43%* dibandingkan *per 31 Desember 2013*. Hal ini disebabkan oleh masih sedikitnya pos-pos dari pendapatan yang terisi dibandingkan TAYL. Perbandingan realisasi PNBP *per 31 Desember 2014* dan *per 31 Desember 2013* disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5. Perbandingan Realisasi PNBP untuk periode yang berakhir *31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013*

Kode 4 Digit	Uraian	TA 2014 Rp	TA 2013 Rp	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
4231	Pendapatan dan Penjualan Lainnya		1,500,000		
4231	Pendapatan dan Pemindahtanganan Lainnya		6,000,000		
4231	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan		22,500,000		
4232	Pendapatan Jasa Lainnya	16,280,000	58,280,000	(42,000,000)	-72.07
4239	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	12,740,000	-	12,740,000	
4239	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	-	35,010,000	(35,010,000)	-100.00
4239	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang diderita Negara/ TGR	27,789,104	1,480,000	26,309,104	1777.64
4239	Pendapatan Anggaran Lain-lain		5,060	(5,060)	-100.00
	JUMLAH	56,809,104	124,775,060	(37,965,956)	-30.43

Realisasi
Belanja Negara
Rp.
25.653.667.347,
-

B.2 Belanja Negara

Realisasi belanja secara netto pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian *per 31 Desember 2014* adalah senilai *Rp. 25.653.667.347,-* atau sebesar *92,54%* dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja senilai *Rp. 12.442.593,-*. Anggaran dan realisasi belanja *per 31 Desember 2014* dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir
31 Desember 2014

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja Bruto	Pengembalian	Realisasi Belanja Netto	(%)
51	Belanja Pegawai	7,872,141,000	7,615,315,738	12,442,593	7,602,873,145	96.58
52	Belanja Barang	15,868,865,000	14,153,704,427	-	14,153,704,427	89.19
53	Belanja Modal	3,980,700,000	3,897,089,775	-	3,897,089,775	97.90
57	Belanja Sosial	-	-	-	-	-
JUMLAH		27,721,706,000	25,666,109,940	12,442,593	25,653,667,347	92.54

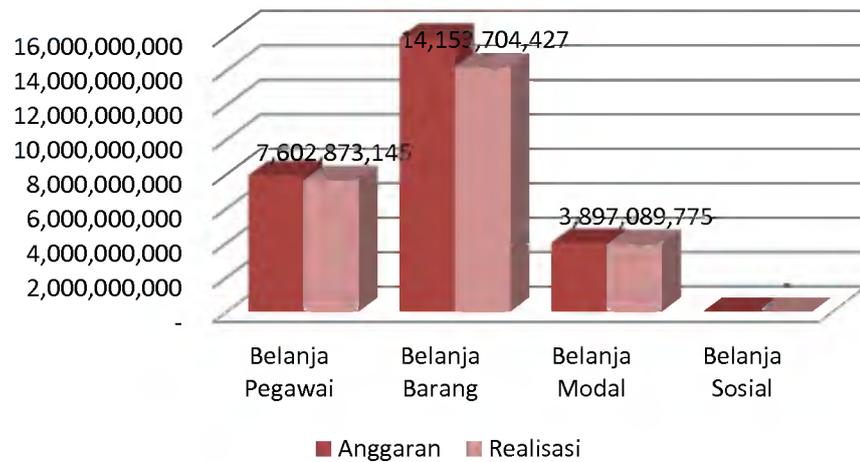
Realisasi belanja Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian per kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran *2014* disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 7. Anggaran dan Realisasi Belanja per Kegiatan untuk periode yang berakhir *31 Desember 2014*

Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi Belanja Bruto	Pengembalian	Realisasi Belanja Netto	(%)
003	Laporan Pengelolaan	3,239,739,000	2,964,825,190	-	2,964,825,190	91.51
008	Laporan Kerjasama	548,000,000	524,046,300	-	524,046,300	95.63
010	Laporan Koordinasi	2,856,164,000	2,491,875,279	-	2,491,875,279	87.25
013	Teknologi Spesifik Ld	400,750,000	307,201,000	-	307,201,000	76.66
015	Rekomendasi Kebija	602,872,000	385,319,200	-	385,319,200	63.91
018	Teknologi yg Terdise	2,926,947,000	2,785,475,235	-	2,785,475,235	95.17
019	Laporan Pelaksanaa	3,106,510,000	2,550,158,172	-	2,550,158,172	82.09
024	Pengadaan Buku	30,000,000	29,999,775	-	29,999,775	100.00
994	Layanan Perkantoran	10,045,921,000	9,746,029,789	12,442,593	9,733,587,196	96.89
995	Kendaraan Bermotor	845,000,000	844,970,000	-	844,970,000	100.00
996	Perangkat Pengolah	300,000,000	298,623,000	-	298,623,000	99.54
997	Peralatan dan Fasilit	911,882,000	840,543,000	-	840,543,000	92.18
998	Gedung dan Banguna	1,893,818,000	1,882,954,000	-	1,882,954,000	99.43
003	PNBP	14,103,000	14,090,000	-	14,090,000	99.91
JUMLAH		27,721,706,000	25,666,109,940	12,442,593	25,653,667,347	92.54

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir
31 Desember 2014



Realisasi belanja untuk periode yang berakhir *31 Desember 2014* mengalami penurunan senilai *Rp. 6.450.643.655,-* dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya disebabkan antara lain karena belanja barang menurun disebabkan adanya penghematan, rapat/ pertemuan dihimbau untuk dilaksanakan di kantor, belanja modal meningkat dalam rangka mendukung rencana kerja strategis sedangkan belanja pegawai meningkat dikarenakan adanya peningkatan jumlah pegawai. Perbandingan realisasi belanja untuk periode yang berakhir *31 Desember 2014* dan periode yang sama tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8. Perbandingan realisasi Belanja untuk periode yang berakhir
31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja (Rp)		Naik / (Turun)	
		TA 2014	TA 2013	Rp	%
51	Belanja Pegawai	7,602,873,145	7,368,890,953	233,982,192	3.18
52	Belanja Barang	14,153,704,427	20,918,023,134	(6,764,318,707)	-32.34
53	Belanja Modal	3,897,089,775	3,817,396,915	79,692,860	2.09
57	Belanja Sosial	-	-	-	-
JUMLAH		25,653,667,347	32,104,311,002	(6,450,643,655)	-20.09

Atas realisasi belanja tersebut, tercatat tidak ada transaksi non kas.

Realisasi
Belanja
Pegawai Rp.
7.602.873.145,-

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir *31 Desember 2014* adalah senilai *Rp. 7.602.873.145,-* atau sebesar *96,58%* dari Pagu Anggaran setelah dikurangi pengembalian senilai *Rp. 12.442.593,-*.

Tabel 9. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Berdasarkan Sub Kelompok Belanja untuk periode yang berakhir *31 Desember 2014*

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	4,783,195,000	4,798,704,900	100.32
Belanja Pembulatan Gaji PNS	79,000	78,337	99.16
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	362,573,000	361,939,420	99.83
Belanja Tunj. Anak PNS	92,103,000	91,757,934	99.63
Belanja Tunj. Struktural PNS	104,930,000	104,815,000	99.89
Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,091,940,000	1,107,340,000	101.41
Belanja Tunj. PPh PNS	346,498,000	221,798,907	64.01
Belanja Tunj. Beras PNS	280,933,000	254,554,240	90.61
Belanja Uang Makan PNS	530,768,000	439,855,000	82.87
Belanja Tunj. Umum PNS	171,437,000	144,465,000	84.27
Belanja Uang Lembur	107,685,000	90,007,000	83.58
Belanja Pegawai Transito	0	-	0.00
Jumlah Bruto	7,872,141,000	7,615,315,738	96.74
Pengembalian	0	12,442,593	0.00
Jumlah Netto	7,872,141,000	7,602,873,145	96.58

Realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir *31 Desember 2014* dan *31 Desember 2013* adalah masing-masing senilai *Rp. 7.602.873.145,-* dan *Rp. 7.368.890.953,-*. Kenaikan realisasi belanja pegawai antara lain disebabkan telah terealisasinya kenaikan gaji pegawai dan juga gaji ke-13 dan terdapat mutasi pegawai dari instansi lain. Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 10. Perbandingan Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir *31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013*

Uraian	TA 2014 (Rp)	TA 2013 (Rp)	Naik / (turun)	
			Rp	%
Belanja Gaji Pokok PNS	4,798,704,900	4,434,631,000	364,073,900	8.21
Belanja Pembulatan Gaji PNS	78,337	76,078	2,259	2.97
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	361,939,420	327,318,470	34,620,950	10.58
Belanja Tunj. Anak PNS	91,757,934	84,683,480	7,074,454	8.35
Belanja Tunj. Struktural PNS	104,815,000	97,815,000	7,000,000	7.16
Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,107,340,000	1,330,240,000	(222,900,000)	-16.76
Belanja Tunj. PPh PNS	221,798,907	220,907,022	891,885	0.40
Belanja Tunj. Beras PNS	254,554,240	246,088,700	8,465,540	3.44
Belanja Uang Makan PNS	439,855,000	435,770,000	4,085,000	0.94
Belanja Tunjangan Lain2/ Uang Duka		15,474,900		
Belanja Tunj. Umum PNS	144,465,000	155,880,000	(11,415,000)	-7.32
Belanja Uang Lembur	90,007,000	31,682,000	58,325,000	184.10
Jumlah Bruto	7,615,315,738	7,380,566,650	234,749,088	3.18
Pengembalian	12,442,593	11,675,697	766,896	6.6
Jumlah Netto	7,602,873,145	7,368,890,953	233,982,192	3.18

*Realisasi**Belanja Barang**Rp.**14.153.704.427,*

-

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi belanja barang untuk periode yang berakhir *31 Desember 2014* adalah senilai *Rp. 14.153.704.427,-* atau sebesar *89,19%* dari Pagu Anggaran setelah dikurangi pengembalian senilai *Rp. 0,-*.

Tabel 11. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Berdasarkan Sub Kelompok Belanja untuk periode yang berakhir *31 Desember 2014*

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	954,260,000	950,442,326	99.60
Belanja Barang Non Operasional	4,288,755,000	3,668,931,690	85.55
Belanja Jasa	1,204,400,000	983,003,772	81.62
Belanja Pemeliharaan	855,470,000	838,317,953	98.00
Belanja Perjalanan	8,565,980,000	7,713,008,686	90.04
Jumlah Bruto	15,868,865,000	14,153,704,427	89.19
Pengembalian	0	0	0
Jumlah Netto	15,868,865,000	14,153,704,427	89.19

Realisasi Belanja Barang untuk diserahkan (526) pada periode yang berakhir *31 Desember 2014* adalah senilai *Rp. 0,-*.

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir *31 Desember 2014* dan *31 Desember 2013* adalah masing-masing senilai *Rp. 14.153.704.427,-* dan *Rp. 20.918.023.134,-*. Penurunan realisasi Belanja Barang sebesar *32,34%* antara lain

disebabkan penurunan realisasi belanja barang non operasional, belanja jasa dan belanja perjalanan. Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 12. Perbandingan Belanja Barang untuk periode yang berakhir *31 Desember 2014* dan *31 Desember 2013*

Uraian	TA 2014 (Rp)	TA 2013 (Rp)	Naik / (turun)	
			Rp	%
Belanja Barang Operasional	950,442,326	865,336,475	85,105,851	9.84
Belanja Barang Non Operasional	3,668,931,690	4,910,654,958	(1,241,723,268)	-25.29
Belanja Jasa	983,003,772	3,859,553,353	(2,876,549,581)	-74.53
Belanja Pemeliharaan	838,317,953	847,578,243	(9,260,290)	-1.09
Belanja Perjalanan Dinas	7,713,008,686	10,460,246,325	(2,747,237,639)	-26.26
Jumlah Bruto	14,153,704,427	20,943,369,354	(6,789,664,927)	-32.42
Pengembalian	-	25,346,220	(25,346,220)	0.00
Jumlah Netto	14,153,704,427	20,918,023,134	(6,764,318,707)	-32.34

Realisasi

Belanja Modal

Rp.

3.897.089.775,-

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi belanja modal untuk periode yang berakhir *31 Desember 2014* adalah senilai Rp. 3.897.089.775,- atau sebesar *97,90%* dari Pagu Anggaran setelah dikurangi pengembalian senilai Rp. 0,-.

Tabel 13. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal berdasarkan Sub Kelompok Belanja untuk periode yang berakhir *31 Desember 2014*

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,056,882,000	1,984,136,000	96.46
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,893,818,000	1,882,954,000	99.43
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	30,000,000	29,999,775	99.99925
Belanja Modal BLU	0	0	0
Jumlah Bruto	3,980,700,000	3,897,089,775	97.90
Pengembalian	0	0	0
Jumlah Netto	3,980,700,000	3,897,089,775	97.90

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir *31 Desember 2014* dan *31 Desember 2013* adalah masing-masing senilai Rp. 3.897.089.775,- dan Rp. 3.817.396.915,-. Kenaikan realisasi Belanja modal sebesar *2,09%* antara lain disebabkan peningkatan realisasi belanja modal yang disesuaikan dengan tupoksi Balai Besar Pengkajian. Belanja modal yang sudah

terrealisasi antara lain meliputi *pengadaan buku, pengadaan perlengkapan sarana gedung, pengadaan meubelair, kendaraan bermotor, rehabilitasi gedung, pengadaan alat studio dan komunikasi dan pengadaan alat pengolah data*. Rincian Belanja modal disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir *31 Desember 2014* dan *31 Desember 2013*

Uraian	TA 2014 (Rp)	TA 2013 (Rp)	Naik / (turun)	
			Rp	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,984,136,000	1,204,179,000	779,957,000	64.77
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,882,954,000	2,484,243,000	(601,289,000)	-
Belanja Modal Jalan, Inggasi dan Jaringan	-	69,000,000	(69,000,000)	-
Belanja Modal Lainnya	29,999,775	59,974,915	(29,975,140)	-
Jumlah Bruto	3,897,089,775	3,817,396,915	79,692,860	2.09
Pengembalian	-	-	-	-
Jumlah Netto	3,897,089,775	3,817,396,915	79,692,860	2.09

Realisasi
Belanja Sosial
Rp. 0,-

B.2.4 Belanja Sosial

Realisasi belanja sosial untuk periode yang berakhir *31 Desember 2014* adalah senilai *Rp. 0,-* atau sebesar *0,00%* dari Pagu Anggaran setelah dikurangi pengembalian senilai *Rp. 0,-*.

Tabel 15. Anggaran dan Realisasi Belanja sosial Berdasarkan Sub Kelompok Belanja untuk periode yang berakhir *31 Desember 2014*

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Bansos Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0
Belanja Bansos Untuk Jaminan Sosial	0	0	0
Belanja Bansos Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0
<Rincian lainnya>	0	0	0
Jumlah Bruto	0	0	0
Pengembalian	0	0	0

Realisasi Belanja Sosial untuk periode yang berakhir *31 Desember 2014* dan *31 Desember 2013* adalah masing-masing senilai *Rp. 0,-* dan *Rp. 0,-*. Rincian Belanja Sosial disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 16. Perbandingan Realisasi Belanja Sosial untuk periode yang berakhir *31 Desember 2014* dan *31 Desember 2014*

Uraian	TA 2014 (Rp)	TA 2013 (Rp)	Naik / (turun)	
			Rp	%
Belanja Bansos Untuk Rehabilitasi Sosial				
Belanja Bansos Untuk Jaminan Sosial				
Belanja Bansos Untuk Pemberdayaan Sosial				
Belanja Bansos Untuk Perlindungan Sosial				
Belanja Bansos Untuk Penanggulangan Kemiskinan				
<i><Rincian lainnya></i>				
Jumlah Bruto				
Pengembalian				
Jumlah Netto				

Atas Pendapatan dan Belanja yang tersaji dalam LRA telah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN. Hasil rekonsiliasi tersaji pada *<Lampiran>*.

III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/ 2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN

Rencana Strategis

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi Jakarta bertujuan untuk memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran *Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian* diharapkan kualitas laporan K/L dapat dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas *Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian* berkomitmen dengan visi “mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui pembinaan akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”

Untuk mewujudkan visi tersebut *Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian* melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pembinaan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplentasikan.
- Mengembangkan sistem pembinaan yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2014 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh *Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian*. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya

A.4. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2014 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan *Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian* adalah sebagai berikut:

Pendapatan

(1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Negara (KUN) yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas brutto, yaitu dengan membukukan penerimaan brutto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Belanja

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan pada lembar muka laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

Aset

(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan

uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian, harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Satker

per 31 Desember 2014 berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- (a). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan
- (b). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (c). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian..

*Piutang
Jangka
Panjang*

c. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri dan bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Aset
Lainnya

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi, Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Kewajiban

(4) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan

setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

*Ekuitas
Dana*

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan *kewajiban* pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan *kewajiban* jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih*

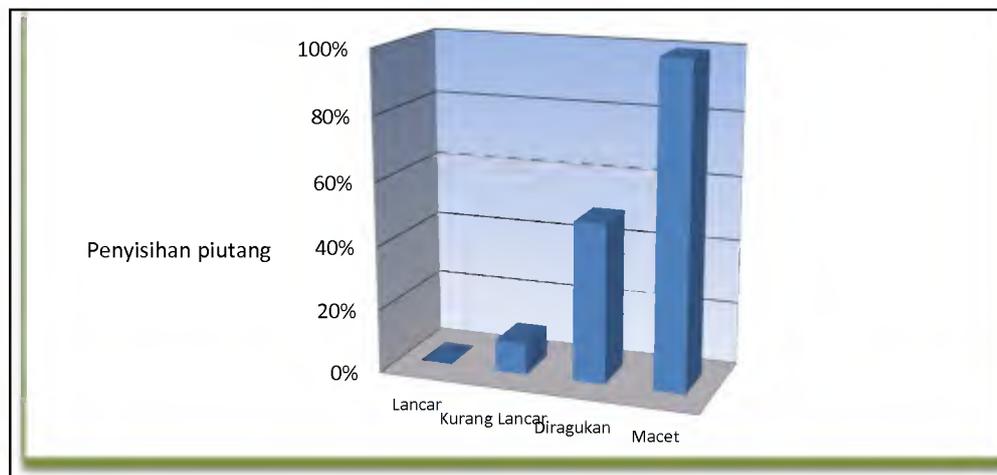
(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/20110 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Tabel 3
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Grafik 2
Penggolongan Kualitas Piutang



Penyusutan
Aset Tetap

(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :

- Tanah
- Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

- Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan / atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

II. NERACA

BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
NERACA
PER 31 Desember 2014 DAN 2013

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2014	31 Desember 2013
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	Rp 0	Rp 358.101.294
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	Rp 0	Rp 0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	Rp 7.596.803.600	Rp 7.476.998.266
Kas pada Badan Layanan Umum	C.1.4	Rp 0	Rp 0
Jumlah Kas dan Bank		Rp 0	Rp 0
Piutang			
Piutang Bukan Pajak	C.1.5	Rp 0	Rp 0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.6	Rp (0)	Rp (0)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)	C.1.7	Rp 0	Rp 0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.1.8	Rp (0)	Rp (0)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	C.1.9	Rp 51.796.542	Rp 0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	C.1.10	Rp (258.983)	Rp (0)
Jumlah Piutang (Bersih)		Rp 0	Rp 0
Belanja DiBayar Dimuka	C.1.11	Rp 0	Rp 0
Uang Muka Belanja (Prepayment)	C.1.12	Rp 0	Rp 0
Persediaan	C.1.13	Rp 271.500	Rp 91.000
Persediaan Badan Layanan Umum	C.1.14	Rp 0	Rp 0
Jumlah Aset Lancar		Rp 7.648.612.659	Rp 7.835.190.560
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2.1	Rp 0	Rp 0
Tanah Badan Layanan Umum	C.2.2	Rp 0	Rp 0
Peralatan dan Mesin	C.2.3	Rp 10.156.138.831	Rp 7.908.175.063
Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum	C.2.4	Rp 0	Rp 0
Gedung dan Bangunan	C.2.5	Rp 10.956.768.273	Rp 9.073.814.273
Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum	C.2.6	Rp 0	Rp 0
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.7	Rp 770.646.300	Rp 770.646.300
Jalan Irigasi dan Jaringan Badan Layanan Umum	C.2.8	Rp 0	Rp 0
Aset Tetap Lainnya	C.2.9	Rp 239.181.090	Rp 209.181.315
Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum	C.2.10	Rp 0	Rp 0
KDP	C.2.11	Rp 516.574.550	Rp 0
Akumulasi Penyusutan	C.2.12	Rp (8.720.705.693)	Rp (7.546.604.843)
Jumlah Aset Tetap		Rp 13.402.028.801	Rp 10.415.212.108
Piutang Jangka Panjang	C.3		
Tagihan Penjualan Angsuran	C.3.1	Rp 0	Rp 0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Tagihan Penjualan Angsuran	C.3.2	Rp (0)	Rp (0)
TP/TGR	C.3.3	Rp 0	Rp 0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	C.3.4	Rp (0)	Rp (0)
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih)		Rp 0	Rp 0

Aset Lainnya	C.4		
Aset Tak Berwujud	C.4.1	Rp 0	Rp 0
Aset Tak Berwujud Badan Layanan Umum	C.4.2	Rp 0	Rp 0
Aset Lain-Lain	C.4.3	Rp 0	Rp 0
Aset Lain-Lain Badan Layanan Umum	C.4.4	Rp 0	Rp 0
Jumlah Aset Lainnya		Rp 0	Rp 0
JUMLAH ASET		Rp 21.050.641.460	Rp 18.250.402.668
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.5.1	Rp 7.596.803.600	Rp 7.476.998.266
Uang Muka dari KPPN	C.5.2	Rp 0	Rp 358.101.294
Pendapatan Yang Ditangguhkan	C.5.3	Rp 0	Rp 0
Pendapatan Diterima Dimuka	C.5.4	Rp 0	Rp 0
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.5.5	Rp 0	Rp 0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		Rp 7.596.803.600	Rp 7.835.099.560
JUMLAH KEWAJIBAN		Rp 7.596.803.600	Rp 7.835.099.560
EKUITAS DANA			
Ekuitas Dana Lancar	C.6		
Cadangan Piutang	C.6.1	Rp 51.537.559	Rp 0
Cadangan Persediaan	C.6.2	Rp 271.500	Rp 91.000
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	C.6.3	Rp (0)	Rp (0)
Dana Lancar Badan Layanan Umum	C.6.4	Rp 0	Rp 0
Ekuitas Dana Lancar Lainnya	C.6.5	Rp 0	Rp 0
Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima	C.6.6	Rp 0	Rp 0
Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan	C.6.7	Rp (0)	Rp (0)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		Rp 51.809.059	Rp 91.000
Ekuitas Dana Investasi	C.7		
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	C.7.1	Rp 13.402.028.801	Rp 10.415.212.108
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	C.7.2	Rp 0	Rp 0
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		Rp 13.402.028.801	Rp 10.415.212.108
JUMLAH EKUITAS DANA		Rp 13.453.837.860	Rp 10.415.303.108
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		Rp 21.050.641.460	Rp 18.250.402.668

Bogor, 31 Desember 2014

Kepala Balai Besar,

Dr. Ir. Abdul Basit, MS
Nip. 19610929 198603 1 003